



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUNIARTI KURNIANDARI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
3. NHK : 413166

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 915.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 56 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 56.000.000
4. Tanah Seluas 84 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp. 84.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 248.000.000

1. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 125 Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA H1BO2N42LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOBIL, TOYOTA MINIBUS VELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 75.500.000

**D. SURAT BERTAHAPAN**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 140.489.393



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.378.989.393
III. HUTANG	Rp.	157.565.725
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.221.423.668

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.